



MISA HARI RAYA OUR LADY GUADALUPE

Paus Fransiskus meninggalkan tempat setelah Misa hari raya Our Lady Guadalupe di Basilika Santo Peter, Vatikan, Sabtu (12/12).

180 Ribu Kematian Akibat Korona di Brasil

Meskipun Presiden Jair Bolsonaro mengatakan bahwa Brasil kini berada di 'ujung akhir' pandemi para ahli di negara itu memperingatkan bahwa negara itu sedang mengalami gelombang kedua infeksi korona.

JAKARTA (IM) - Kasus kematian terkait virus korona (Covid-19) di Brasil semakin hari semakin meningkat. Total kasus kematian di Brasil tercatat lebih dari 180 ribu kematian akibat korona.

Para ahli di negara itu memperingatkan bahwa negara itu sedang mengalami gelombang kedua infeksi korona, meskipun Presiden Jair Bolsonaro mengatakan bahwa Brasil kini berada di 'ujung akhir' pandemi. Namun, data dari Kementerian Kesehatan Brasil melaporkan 672 kematian baru pada Jumat (11/12) waktu setempat, sehingga kini total jumlah kematian mencapai 180.437 sejak pandemi dimulai.

Angka ini menjadikan negara Amerika Selatan itu sebagai negara dengan jumlah kematian karena Corona ter-

tinggi kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (12/12), kurva kasus infeksi dan kematian di Brasil sekarang menunjukkan tanda-tanda jelas dari tren peningkatan, setelah agak turun dari akhir Agustus hingga awal November lalu.

Presiden Bolsonaro mendapat kritik dari oposisi minggu ini karena komentar terbarunya yang memerehkan krisis kesehatan ini. Bolsonaro menyebut saat ini Brasil sudah berada di ujung akhir pandemi di tengah kasus kematian korona yang terus meningkat.

"Kita berada di ujung akhir pandemi. Dibandingkan dengan negara lain di dunia, pemerintah kita adalah yang terbaik, atau salah satu yang terbaik, dalam menanganinya," kata Bolsonaro pada Kamis

(10/12) lalu.

Pakar kesehatan menyatakan tidak setuju dengan pernyataan Bolsonaro yang menyebut Brasil di ujung pandemi. Pernyataan itu dinilai salah besar.

"Presiden salah. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan ide itu, tetapi tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa akhir sudah dekat," kata Christovam Barcellos, seorang peneliti di pusat penelitian kesehatan masyarakat terkemuka Brasil, Fiocruz.

Padahal, jumlah kasus infeksi juga kembali meningkat tajam. Angkanya melampaui angka 54.000 kasus pada hari Jumat (11/12), dengan total 6,8 juta kasus sejak pandemi dimulai.

Barcellos justru memperingatkan warga Brasil agar lebih berhati-hati. Sebab, menurutnya, situasi bisa menjadi lebih buruk lagi dengan musim liburan dan musim panas di belahan bumi selatan.

"Akan ada lebih banyak orang yang bepergian, tanpa langkah-langkah pengendalian dan dengan banyak kebijakan jarak sosial kita yang kini dilonggarkan," kata Barcellos kepada AFP.

Diketahui, Presiden Bolsonaro telah berselisih dengan

para ahli kesehatan tentang bagaimana menanggapi pandemi korona, bahkan sejak sebelum wabah ini tiba di negara berpenduduk 212 juta orang tersebut. Kasus infeksi korona pertama dikonfirmasi di Brasil pada 26 Februari.

Dia telah memerehkan virus korona ini sebagai 'flu ringan', mengutuk 'histeria' di sekitarnya dan mendorong untuk menggunakan obat hydroxychloroquine untuk melawan Covid-19, meskipun serangkaian penelitian menunjukkan bahwa itu tidak efektif.

Sementara itu, direktur Institut Vaksin Nasional Thailand, Nakorn Prem Sri menyebutkan, pandemi Covid-19 kemungkinan akan berlanjut setidaknya selama tiga tahun, mengingat vaksin telah tersedia di seluruh dunia saat ini.

Dia menuturkan, pandemi Covid-19 belum akan berakhir dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan. Alasannya, karena dalam kurun waktu satu atau dua tahun ke depan vaksin dengan dosis yang memadai belum tersedia untuk seluruh dunia.

"Ketersediaannya tergantung kapasitas produksi. Diperlukan sekitar 10 miliar dosis jika kita ingin mengakhiri pandemi

Pada 2021, vaksin baru akan tersedia enam bulan kemudian," ucap Prem Sri, seperti dilansir Tass pada Minggu (13/12).

"AstraZeneca berencana memproduksi tiga miliar dosis vaksin pada 2021, Pfizer dan Moderna, masing-masing satu miliar. Tahun depan, sekitar lima atau enam miliar dosis vaksin akan tersedia untuk seluruh dunia," sambungnya.

Prem Sri mengatakan, mengingat tingkat kesulitan dalam memproduksi dan distribusi vaksin, tidak mungkin bisa memproduksi dan mengirimkan 10 miliar vaksin hanya dalam kurun waktu satu tahun.

"Sekarang, ini semua tentang distribusi vaksin, karena banyak negara telah mememangnya sendiri dan tentang kapasitas produksi karena tidak mungkin untuk memproduksi 10 miliar dosis vaksin yang diperlukan dalam rentang satu tahun," ujarnya.

"Kami masih belum tahu apakah perlu vaksinasi ulang. Belum ada yang punya data seperti itu. Orang yang divaksinasi perlu diamati dalam waktu lama, enam bulan, setahun, untuk melihat apakah perlu vaksinasi ulang, karena ini adalah infeksi baru bagi kami," tukasnya. ● tom

950 Kasus Sehari, Korsel Nyatakan Darurat Covid -19

SEOUL (IM) - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in menyebut gelombang ketiga Covid-19 dalam kondisi darurat dengan 950 kasus virus korona pada Sabtu (12/12).

Jumlah tersebut melebihi 909 kasus pada akhir Februari lalu. Otoritas Korea Selatan memperingatkan bahwa mereka mungkin mempercepat pembatasan jarak sosial ke tingkat yang paling ketat tetapi meningkatnya hingga saat ini.

Dari kasus Jumat yang dilaporkan Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA), 928 kasus ditularkan secara lokal dan 22 diimpor, sehingga total menjadi 41.736 infeksi dengan 578 kematian.

Lebih dari 70% kasus yang ditularkan di dalam negeri berasal dari Seoul dan daerah sekitarnya, di mana sekitar setengah dari 52 juta orang tinggal.

"Ini memang situasi darurat," ungkap Presiden Moon Jae-in memerintahkan mobilisasi polisi, personel militer, dan dokter medis publik untuk mengkeang penyebaran virus corona, yang terutama didorong kelompok-kelompok kecil yang tersebar luas.

"Kami berencana memperluas metode pengujian virus corona melalui drive-through dan walk-through sebagai tindakan pencegahan untuk melacak orang yang terinfeksi dan memblokir penyebarannya," papar Moon dalam posting Facebook.

"Korea Selatan kemungkinan akan melihat peningkatan lebih lanjut dalam jumlah kasus dengan peningkatan pengujian," ujar Moon.

Lonjakan tersebut menjadi pukulan bagi sistem pemberantasan pandemi kebanggaan Korea Selatan, yang menggunakan penelusuran invasif, pengujian, dan karantina untuk melawan gelombang sebelumnya tanpa penguncian.

Dengan metode itu Korsel

mampu menjaga infeksi harian di bawah 50 kasus selama sebagian besar musim panas.

"Saya khawatir ketika saya mendengar jumlah virus corona harian melebihi 900 infeksi," ujar Chae Hyeung-chan, 29, kepada Reuters dalam kunjungannya ke Seoul untuk janji dengan dokter dari kota pelabuhan Incheon.

"Saya harus naik kereta bawah tanah hari ini, yang membuat saya khawatir, karena saya takut terkena risiko infeksi. Saya akan mencoba kembali ke rumah secepat mungkin," ujar dia.

Gelombang ketiga datang meskipun aturan jarak sosial yang lebih ketat mulai berlaku pada Selasa, termasuk jam malam yang belum pernah terjadi sebelumnya di restoran dan sebagian besar bisnis lainnya. Negara itu telah melaporkan sekitar 600 kasus setiap hari pekan ini.

Seoul berada dalam batasan level 2,5. Meningkatkan menjadi 3, yang tertinggi dari lima tingkat, akan membutuhkan sekolah beralih ke pembelajaran jarak jauh, hanya mengizinkan pekerja penting di kantor dan melarang pertemuan lebih dari 10 orang.

Perdana Menteri Chung Sye-kyun mengatakan, pemerintah akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan gelombang ketiga. "Jika kita tidak menghentikan penyebarannya sekarang, meningkatkan pembatasan jarak sosial ke Level 3 tidak akan terhindarkan," ungkap Chung.

Pihak berwenang mendesak orang-orang untuk tinggal di rumah dan membatalkan semua pertemuan tatap muka karena infeksi baru telah terlihat dari pertemuan pribadi. "Meskipun kita tidak dapat menghindari kontak dengan keluarga kita di rumah, pertemuan dengan teman dan kolega Anda di tempat kerja tidaklah aman. Tolong batalkan," ungkap pejabat senior KDCA Lim Sook-young. ● gul

UE Kecam Eksekusi Mati Jurnalis Anti-Rezim Pemerintah Iran

BRUSSELS (IM) - Uni Eropa (UE) mengatakan mereka mengutuk dalam "istilah terkuat" eksekusi mati terhadap Ruhollah Zam oleh pemerintah Iran.

Zam dijatuhi hukuman oleh pengadilan Iran atas tuduhan mengobarkan kekerasan selama protes anti-pemerintah tahun 2017. "UE mengutuk tindakan ini dengan sangat keras dan mengingat sekali lagi penolakannya yang tidak dapat ditarik kembali terhadap penggunaan hukuman mati dalam keadaan apapun," kata pernyataan dari Layanan

Tindakan Eksternal UE.

Badan yang berbasis di Brussels, Belgia tersebut mengatakan hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang tidak mencegah kejahatan. "UE menyerukan Iran untuk menahan diri dari melakukan eksekusi di masa depan dan untuk mengejar kebijakan yang konsisten menuju penghapusan hukuman mati," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (13/12).

Zam sendiri adalah seorang jurnalis yang menjalankan Amadnews di aplikasi Telegram, yang

memiliki lebih dari satu juta pengikut. Pada bulan Juni, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Zam, dengan mengatakan dia telah dihukum karena "korupsi", tuduhan yang sering digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan spionase atau upaya untuk menggulingkan pemerintah Iran.

Mahkamah Agung Iran pada Selasa menguatkan vonis mati terhadap Zam, yang ditangkap pada 2019 setelah bertahun-tahun diasingkan. Dia dihukum mati, dengan cara digantung Sabtu (12/12). ● ans

Oman Sambut Normalisasi Hubungan Maroko dan Israel

MUSKAT (IM) - Oman menyambut keputusan Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel. "Oman berharap pengumuman terbaru oleh Raja Maroko Mohammed VI akan memperkuat upaya untuk perdamaian komprehensif, kuat dan permanen di Timur Tengah," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Oman, dilansir Anadolu.

Maroko menjadi negara keempat yang menormalkan hubungan dengan Israel, setelah

Sudan mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel dan menghentikan semua agresi pada negara Yahudi itu pada Oktober.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Kamis bahwa, "Israel dan Maroko telah menyetujui hubungan diplomatik penuh." Dia menyebut kesepakatan itu sebagai "terobosan besar-besaran" untuk perdamaian di Timur Tengah.

Kantor Kerajaan Maroko dalam satu pernyataan mengonfirmasi bahwa negara itu bermak-

sud melanjutkan kontak resmi dan hubungan diplomatik dengan Israel "secepat mungkin".

Bahrain dan UEA sepakat pada September untuk membangun hubungan diplomatik, budaya, dan komersial penuh dengan Israel setelah menandatangani perjanjian kontroversial di Gedung Putih. Kesepakatan itu telah menarik kecaman luas dari warga Palestina yang mengatakan kesepakatan itu mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani kepentingan Palestina. ● tom



PEMAKAMAN PAOLO ROSSI - ITALIA

Mantan pemain Italia Marco Tardelli dan anggota timnas Piala Dunia 1982 membawa peti jenazah Paolo Rossi didepan Katedral Vicenza, Vicenza, Italia, Sabtu (12/12).

Sekjen PBB: Deklarasikan Status Darurat Iklim untuk Hindari Bencana

LONDON (IM) - Para pemimpin dunia harus mendeklarasikan status "darurat iklim" di negara-negara mereka untuk mendorong aksi menghindari bencana pemanasan global.

Seruan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) iklim pada Sabtu (12/12).

Lebih dari 70 pemimpin dunia akan berpidato dalam pertemuan virtual satu hari yang bertujuan membangun momentum pengurangan emisi pada peringatan lima tahun kesepakatan iklim Paris 2015.

"Adakah yang masih menyangkal bahwa kita menghadapi keadaan darurat yang dramatis?" ujar Guterres melalui video.

"Itulah mengapa hari ini, saya menyerukan kepada semua pemimpin di seluruh dunia untuk mendeklarasikan Keadaan Darurat Iklim di negara mereka sampai netralitas karbon tercapai," papar dia.

Guterres mengatakan paket pemulihan ekonomi yang diluncurkan setelah pandemi virus corona mewakili peluang mempercepat transisi ke masa depan rendah karbon.

Namun dia memperingatkan bahwa langkah itu tidak terjadi cukup cepat.

"Sejauh ini, anggota G20 membelanjakan 50% lebih banyak untuk stimulus dan paket penyelamatan mereka di sektor-sektor yang terkait dengan produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, daripada energi rendah karbon," ujar Guterres.

"Ini tidak bisa diterima. Triliun dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan Covid adalah uang yang kita pinjam dari generasi mendatang," ungkap dia.

"Kita tidak dapat menggunakan sumber daya ini untuk mengunci kebijakan yang membebani generasi mendatang dengan segunung utang di planet yang rusak," tegas dia.

Pada Jumat, tuan rumah KTT iklim, Inggris berjanji mengakhiri dukungan langsung pemerintah untuk proyek bahan bakar fosil di luar negeri.

Langkah Inggris itu demi memacu langkah serupa oleh negara lain untuk mempercepat pergeseran ke energi yang lebih bersih. Tiongkok mengejutkan banyak pengamat dengan mengumumkan tujuan menjadi netral karbon pada 2060, termasuk India dan Jepang. ● gul

Pengadilan Austria Batalan Larangan Jilbab di Sekolah Dasar

WINA (IM) - Pengadilan konstitusional Austria membatalkan undang-undang yang melarang jilbab di sekolah dasar. Pengadilan mengatakan undang-undang yang diperkenalkan tahun lalu itu tidak konstitusional dan diskriminatif.

Dalam pernyataan yang menjelaskan keputusan tersebut, pengadilan mengatakan undang-undang tersebut melanggar prinsip kesetaraan dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan hati nurani seperti dikutip dari Al Arabiya, Sabtu (12/12).

Undang-undang tersebut melarang anak perempuan di bawah 10 tahun mengenakan jilbab dan telah ditentang oleh dua anak dan orang tua mereka.

Undang-undang itu disahkan pada Mei 2019 di bawah koalisi pemerintahan sebelumnya dari Partai Rakyat Kanan-tengah (OeVP) dan Partai Kebebasan (FPÖ) sayap kanan, hanya beberapa hari sebelum pemerintah itu runtuh karena

skandal korupsi.

Kedua partai telah membuat retorika anti-imigrasi dan peringatan terhadap "masyarakat paralel" sebagai bagian pentingnya dari pesan politik mereka dan juru bicara mereka menjelaskan pada saat itu bahwa undang-undang tersebut menargetkan penggunaan jilbab.

Namun, teks undang-undang tersebut berusaha menghindari tuduhan diskriminasi dengan menggunakan kata-kata melarang pakaian yang dipengaruhi ideologis atau agama yang dikaitkan dengan penutup kepala.

Namun demikian, pengadilan mengatakan bahwa undang-undang tersebut hanya dapat dipahami sebagai target penutup kepala Islam.

Pemerintah OeVP-FPOe sendiri telah mengatakan bahwa penutup kepala patka yang dikenakan oleh anak laki-laki Sikh atau kippa Yahudi tidak akan terpengaruh. ● ans



LOKASI SERANGAN DI PEMUKIMAN DI KABUL

Pria Afghan memegang sisa roket di lokasi serangan di rumah pemukiman di Kabul, Afghanistan, Sabtu (12/12).

Pengadilan Wisconsin Tolak Tuntutan Trump Batalan Kemenangan Biden

WASHINGTON (IM) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menantang hasil pemilu di beberapa negara bagian. Ia bersikeras bahwa pemilu itu "dicurangi" oleh Partai Demokrat untuk mendukung Joe Biden. Namun, sayangnya upaya Trump tersebut menemui tembok tebal. Terbaru, tuntutan Trump di Wisconsin ditolak oleh pengadilan setempat.

Tim kampanye Trump mengajukan tuntutan ke pengadilan Wisconsin untuk membatalkan kemenangan Biden. Seorang hakim federal di Milwaukee, kota terbesar di Wisconsin, mengatakan pihaknya menolak tuntutan itu karena tidak adanya bukti yang jelas.

"Karena penggugat gagal menunjukkan penyimpangan yang jelas dari arahan Badan Legislatif Wisconsin, pengaduanannya harus dibatalkan," kata hakim distrik, Brett Ludwig, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (13/12).

Wisconsin telah mensertifikasi kandidat dari partai Demokrat, Joe Biden sebagai pemenang, dengan keunggulan 0,7 persen suara atas

Trump. Selain itu, penghitungan ulang di dua wilayah terbesar di negara bagian itu mengkonfirmasi kemenangan bagi Biden, yang dianggap sebagai presiden terpilih.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS menolak gugatan dari Texas, yang diajukan oleh Jaksa Agung Ken Paxton, yang berusaha untuk mengesampingkan kemenangan Biden di empat negara bagian di medan pertempuran Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Gugatan tersebut, mengutip pelanggaran di pihak negara bagian yang disebutkan di atas, terutama mengubah status pemilihan mereka menjelang pemilihan dengan menggunakan pandemi sebagai dalih.

Trump berjanji untuk campur tangan dalam gugatan tersebut, mengungkapkan harapan bahwa Mahkamah Agung akan memberi lampu hijau pada mosi tersebut. Menyusul putusan tersebut, presiden mengeluarkan pernyataan di Twitter yang mengutuk keputusan tersebut dan mengulangi klaim kecurangan pemilu. ● gul